

**PENGARUH PAJAK TANGGUHAN, PERENCANAAN PAJAK DAN
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA
PERUSAHAAN FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA TAHUN 2013-2018**

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh derajat Strata Satu (S-1)
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal

AMANATUN KHOIROH

NPM: 4315500010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Amanatun Khoiroh, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya ajukan ini adalah hasil karya sendiri untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggung jawabannya sepenuhnya berada pada saya.

Tegal, Desember 2019

Yang menyatakan,



Amanatun Khoiroh


**Pengaruh Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Ukuran Perusahaan
Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar
Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018**

AMANATUN KHOIROH


NPM: 4315500010

Disetujui Oleh Pembimbing :


Pembimbing I


Dewi Indriasih, S.E., M.M.
NIPY. 15661651980

Pembimbing II


Yanti Puji Astuti., S.E., M.Si.
NIPY. 196205181987031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal



Dr. Dien Novianv R, S.E., M.M., Akt.
NIPY. 13662811975

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul :

Pengaruh Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018

Yang diajukan oleh Amanatun Khoiroh, NPM: 4315500010 telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Juli 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Ketua Penguji



Sumarno, S.E., M. Si.
NIPY. 8850811965

Penguji I



Budi Susetvo, S.E., M.Si
NIPY. 124523111971


Penguji II



Yanti Puji Astuti, S.E., M.Si.
NIPY. 196205181987031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal




Dr. Dien Novianv R, S.E., M.M., Akt.
NIPY. 13662811975

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul "Pengaruh Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018" sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1) ini di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis menyadari bahwa dari awal, proses, dan hingga terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari segala bentuk bantuan, bimbingan, dorongan dan do'a dari berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada beliau :

1. Dr. Dien Noviany R, S.E., M.M., Akt.Ca., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M, selaku Dosen Pembimbing I, dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, nasehat, dan dukungannya selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Yanti Puji Astuti., S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran rela mengorbankan waktu di tengah kesibukannya untuk membimbing sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh studi

5. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Seperti layaknya tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi nantinya akan diterima dengan senang hati. Penulis berharap semoga skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan bagi pihak yang berkepentingan.

Tegal, Desember 2019

Amanatun Khoiroh

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Ketika anda penasaran, Anda menemukan banyak hal yang menarik dilakukan
(Walth Disney).

PERSEMBAHAN :

1. Bapak dan Ibu yang selalu menyemangatiku.
2. Suami dan Ananda Tercinta
3. Teman-teman seperjuangan
4. Almamaterku UPS Tegal.

ABSTRAK

Amanatun Khoiroh. Pengaruh Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018.

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui pengaruh pajak tangguhan, perencanaan pajak dan ukuran perusahaan secara bersama-sama terhadap manajemen laba, 2) Untuk mengetahui pengaruh pajak tangguhan terhadap manajemen laba, 3) Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba, 4) Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.

Teknik pengumpulan data adalah data sekunder. Metode Analisis Data dan uji hipotesis tersebut menggunakan pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji signifikansi simultan, uji signifikan parameter individual, dan koefisien determinasi.

Kesimpulan penelitian adalah 1) pajak tangguhan, perencanaan pajak dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba., 2). pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba, 3). Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba., 4). ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Kata kunci : Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, Ukuran Perusahaan, Manajemen Laba

ABSTRACT

Amanatun Khoiroh. *Effects of Deferred Taxes, Tax Planning and Company Size on Profit Management in Pharmaceutical Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2018.*

This study aims 1) To determine the effect of deferred tax, tax planning and company size together on earnings management, 2) To determine the effect of deferred tax on earnings management, 3) To determine the effect of tax planning on earnings management, 4) To know the effect of company size on earnings management.

Data collection techniques are secondary data. The method of data analysis and hypothesis testing uses classical assumption testing, multiple linear regression analysis, simultaneous significance test, significant test of individual parameters, and coefficient of determination.

The conclusions of the study are 1) deferred tax, tax planning and company size together affect earnings management., 2). Deferred tax has an effect on earnings management, 3). Tax planning has no effect on earnings management., 4). company size has no effect on earnings management.

Keywords: *Deferred Tax, Tax Planning, Company Size, Profit Management*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	9
1. Teori Agensi	9

2. Teori Akuntansi Positif.....	13
3. Manajemen Laba	16
4. Pajak Tangguhan	24
5. Perencanaan Pajak	27
6. Ukuran Perusahaan	35
B. Studi Penelitian Terdahulu	38
C. Kerangka Pemikiran	39
D. Perumusan Hipotesis	43
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pemilihan Metode	45
B. Teknik Pengambilan Sampel.....	45
C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Teknik Pengolahan Data	52
F. Analisis Data Dan Uji Hipotesis	52
1. Pengujian Asumsi Klasik.....	52
2. Analisis Regresi Linier Berganda.....	54
3. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	55
4. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t).....	55
5. Koefisien Determinasi	56
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Obyek Penelitian	57

1. Deskripsi BEI.....	57
2. Deskripsi Perusahaan Sampel.....	59
B. Deskripsi Data Penelitian	65
C. Analisis Data dan Uji Hipotesis.....	69
1. Uji Asumsi Klasik	69
2. Analisis Regresi Linier Berganda.....	75
3. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	70
4. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t).....	77
5. Koefisien Determinasi	78
D. Pembahasan	79
 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	84
 DAFTAR PUSTAKA	85
 LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
2.1 Studi Penelitian Terdahulu.....	38
3.1 Tahapan Pengambilan Sampel.....	46
3.2 Sampel Penelitian.....	47
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	50
4.1 Data Penelitian.....	66
4.2 Data Uji Normalitas.....	71
4.3 Hasil Pengujian Multikolinieritas.....	72
4.4 Hasil Pengujian Autokorelasi.....	74
4.5 Hasil Analisis Regresi Berganda.....	75
4.6 Hasil Uji Signifikan Parameter Simultan (Uji Statistik F).....	76
4.7 Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t).....	77
4.8 Hasil Analisis Koefisien Determinasi.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1 Kerangka Pemikiran	42
4.1 Hasil Pengujian Normalitas	70
4.2 Hasil Pengujian Heterokedastisitas.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Data <i>Return On Equity</i>	118
2. Data Debt To Equity Ratio.....	120
3. Data Current ratio	122
4. Data Price Book Value.....	124
5. Data Return Saham	126
6. Hasil Pengujian Asumsi Klasik	129
7. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Return On Equity Terhadap Return Saham Syariah.....	131
8. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Debt to equity ratio Terhadap Return Saham Syariah.....	132
9. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Current ratio Terhadap Return Saham Syariah	133
10. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Price to book value Terhadap Return Saham Syariah.....	134
11. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu informasi yang digunakan investor dalam menilai suatu perusahaan adalah laporan keuangan (Tandelilin, 2007). Laporan keuangan merupakan sumber berbagai macam informasi bagi investor sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dan dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Maka dari itu setiap tahun perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bursa Efek, para investor dan publik. Semakin cepat emiten menerbitkan laporan keuangan secara periodik, baik sesudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ataupun belum diaudit, semakin berguna bagi investor (Santana dan Wirakusuma, 2016).

Informasi yang terkandung dalam laba (*earnings*) memiliki peran penting dalam menilai kinerja perusahaan. Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba (*sustainable earnings*) di masa depan, yang ditentukan oleh komponen akrual dan kas dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya (Wiryandari & Yulianti, 2015). Semakin berkualitas laba perusahaan, maka investor

semakin tertarik untuk menjadi salah satu pemilik saham perusahaan tersebut (Sumomba, 2013).

Manajemen laba merupakan sebuah fenomena yang sampai saat ini masih diperdebatkan mengenai pemahaman etis dan tanggung jawab sosialnya. Manajemen laba berada di grey area antara sebuah kecurangan dan merupakan aktivitas yang diijinkan oleh prinsip akuntansi. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan pendapat mengenai tanggung jawab sosial dan pemahaman etis diantara setiap orang. Berdasarkan hal tersebut, laporan keuangan dapat disebut sebagai tanggung jawab sosial pribadi dan cerminan perilaku etis dari orang yang membuat laporan keuangan tersebut (Prasetya, 2016).

Definisi manajemen laba hingga saat ini masih menjadi kontroversi. Sebagian pihak menilai manajemen laba merupakan perbuatan curang yang melanggar prinsip akuntansi. Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, dan menambah bias dalam laporan keuangan serta mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Setiawati & Na'im, 2000). Sedangkan pihak lainnya mengatakan bahwa manajemen laba tidak harus dikaitkan dengan pemilihan metode akuntansi untuk mengatur keuntungan yang bisa dilakukan karena memang diperkenankan menurut akuntansi. Hal ini sesuai dengan teori akuntansi positif yang memperkenankan manajer untuk memilih suatu metode akuntansi tertentu (Aryani, 2012).

Teori keagenan tersebut menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak yang berkepentingan (*principal*) dengan manajemen sebagai pihak yang menjalankan kepentingan (*agent*). Konflik ini muncul pada saat setiap pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkannya (Aditama & Purwaningsih, 2013). Dampak diterapkannya manajemen laba, calon investor dan kreditur merasa dirugikan. Para investor mengalami kegagalan dalam menentukan nilai perusahaan dengan tepat (saat dilakukannya penawaran saham perdana/IPO) sehingga konsekuensinya terjadi kesalahan alokasi dana terhadap perusahaan yang betul-betul prospektif ke perusahaan yang tidak prospektif. Bagi calon kreditur, terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan dimana mereka seharusnya tidak memberikan kredit kepada perusahaan tersebut yang pada akhirnya dapat menimbulkan kredit macet (Santana & Wirakusuma, 2016).

Perusahaan dapat mempercepat pengakuan pendapatan dan menunda pengakuan beban-beban tertentu dengan tanpa melanggar aturan-aturan akuntansi yang berlaku. Sebenarnya perusahaan menghadapi suatu dorongan yang saling bertentangan pada saat melakukan manajemen laba. Pada satu sisi manajemen perusahaan ingin menampilkan kinerja keuangan yang baik dengan memaksimalkan laba yang dilaporkan kepada para pemegang saham dan pengguna eksternal lainnya. Namun demikian, di sisi lain manajemen perusahaan juga menginginkan untuk meminimalkan laba kena pajak yang dilaporkan untuk keperluan pajak (Tundjung, 2015).

Permasalahan berkaitan dengan manajemen laba adalah yang terjadi pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA). Investigasi terhadap laporan keuangan 2017 PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) mendapati dugaan adanya penggelembungan nilai Rp 4 triliun oleh manajemen lama pada beberapa pos akuntansi. Dalam laporan Hasil Investigasi Berbasis Fakta PT Ernst & Young Indonesia (EY) kepada manajemen baru AISA tertanggal 12 Maret 2019, dugaan penggelembungan ditengarai terjadi pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup AISA. Manajemen baru AISA yang dimaksud adalah para manajemen yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 22 Oktober 2018 yang berisi Hengky Koestanto sebagai direktur utama dan Charlie Dungga sebagai direktur. Selain penggelembungan Rp 4 triliun tersebut, ada juga temuan dugaan penggelembungan pendapatan senilai Rp 662 miliar dan penggelembungan lain senilai Rp 329 miliar pada pos EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) entitas bisnis makanan dari emiten tersebut.

Dugaan adanya manajemen laba juga terjadi pada PT. Garuda Indonesia Tbk (GIAA). PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dalam laporan keuangannya menyatakan perusahaan meraih laba sebesar US\$ 809,85 ribu atau sekitar Rp 11,33 miliar. Namun begitu, laporan keuangan GIAA tersebut menuai polemik. Dua direktur GIAA disebut menolak menandatangani laporan keuangan tersebut. Pencatatan tersebut membuat pos pendapatan usaha lainnya penerbangan plat merah itu mencapai US\$ 306,88 juta. Kontrak kerja sama Garuda dengan Mahata mencapai US\$ 239,94 juta atau sekitar Rp 2,98

triliun. Mahata saat ini baru membayar US\$ 6,8 juta. Sedangkan sisa duit yang belum ditransaksikan yakni sebesar US\$ 233,13 juta. Analis Oso Sekuritas Sukarno Alatas mengatakan bila hal tersebut benar adanya, maka hal itu bisa mempengaruhi cashflow perusahaan dan perhitungan valuasi akan berbeda. Laba bersih dan rasio profitability bisa turun, sehingga bisa mempengaruhi valuasi harga saham.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba antara lain (Sumomba, 2013) menjelaskan bahwa beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba, kemudian (Wijaya & Martani, 2011) menjelaskan bahwa Perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*) melakukan praktik manajemen laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang mengalami kerugian serta (Aditama & Purwaningsih, 2013) menjelaskan bahwa perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba, sementara (Santana & Wirakusuma, 2016) menjelaskan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap praktek manajemen laba. Penelitian terdahulu tersebut memberikan hasil penelitian yang tidak konsisten sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali, pada unit yang berbeda yaitu perusahaan Perdagangan Besar Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka peneliti melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh pajak tangguhan, perencanaan pajak dan ukuran perusahaan secara bersama-sama terhadap manajemen laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018 ?
2. Apakah terdapat pengaruh pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018 ?
3. Apakah terdapat pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018 ?
4. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak tangguhan, perencanaan pajak dan ukuran perusahaan secara bersama-sama terhadap manajemen laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018.

2. Untuk mengetahui pengaruh pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. **Manfaat Teoritis**
 - a. Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi kajian mahasiswa dan dosen.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang pengaruh pajak tangguhan, perencanaan pajak, asset perusahaan terhadap manajemen laba.
 - c. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya tentang pajak tangguhan, perencanaan pajak, ukuran perusahaan dan manajemen laba dan analisa terhadap topik penelitian.

2. **Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perencanaan pajak dalam meminimalkan beban pajak.
- b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang pajak tangguhan, perencanaan pajak, ukuran perusahaan dan manajemen laba dalam penerapannya.
- c. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah mengenai perencanaan laba dalam praktik manajemen laba di perusahaan publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Dalam rangka memahami konsep manajemen laba, maka digunakanlah dasar perspektif hubungan keagenan. Teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut agent dan pihak yang lain disebut *principal*. Principal mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada agent, hal ini dapat pula dikatakan bahwa principal memberikan suatu amanah kepada agent untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggungjawab agent maupun principal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama (Muliati, 2011).

Menurut (Jensen & Meckling, 1976) teori keagenan adalah sebuah kontrak antara manajemen (agen) dengan pemilik (prinsipal). Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan lancar, pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Perencanaan kontrak yang tepat bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemilik dalam hal konflik dan kepentingan, hal ini merupakan inti dari teori keagenan (Chariri & Ghazali, 2007).

Scott 2000 dalam (Muliati, 2011) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai banyak kontrak, misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan kontrak pinjaman antara perusahaan dengan krediturnya. Dimana antara agent dan principal ingin memaksimalkan utility masing-masing dengan informasi yang dimiliki. Tetapi di satu sisi, agent memiliki informasi yang lebih banyak (*full information*) dibanding dengan principal di sisi lain, sehingga menimbulkan adanya *asimetry information*. Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan utilitasnya. Sedangkan bagi pemilik modal dalam hal ini investor, akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada (Muliati, 2011).

Agency problem potensial untuk terjadi dalam perusahaan di mana manajer memiliki kurang dari seratus persen saham perusahaan. Dalam perusahaan perseorangan, pemilik sekaligus sebagai manajer akan selalu bertindak memaksimalkan kemakmuran mereka, dan meminimumkan pengeluaran yang tidak diperlukan seperti misalnya pembelian mobil mewah, pembelian pesawat pribadi, perjalanan keliling dunia. Tetapi jika pemilik perusahaan kemudian menjual sebagian saham kepada investor lain maka munculah *agency problem*. Diperusahaan besar *agency problem* sangat potensial terjadi karena proporsi kepemilikan perusahaan oleh manajer relatif kecil. Dalam

kenyataannya tidak jarang tindakan manajer bukannya memaksimumkan kemakmuran pemegang saham melainkan memperbesar skala perusahaan dengan cara ekspansi atau membeli perusahaan lain. Motif utamanya adalah dengan semakin besarnya skala perusahaan maka pertama, meningkatkan keamanan posisi manajer dari ancaman pengambilan oleh perusahaan lain. Perusahaan lain akan kesulitan untuk melakukan takeover. Alasan kedua adalah untuk meningkatkan power, status, dan gaji manajer. Sedangkan alasan lain adalah menciptakan kesempatan bagi *middle* dan *lower manager* (Sartono, 2013).

Masalah keagenan (*agency problems*) muncul dalam dua bentuk, yaitu antara pemilik perusahaan (*principals*) dengan pihak manajemen (*agent*), dan antara pemegang saham dengan pemegang obligasi. Tujuan normatif pengambilan keputusan keuangan yang menyatakan bahwa keputusan diambil untuk memaksimumkan kemakmuran pemilik perusahaan, hanya benar apabila pengambil keputusan keuangan (*agent*) memang mengambil keputusan dengan maksud untuk kepentingan para pemilik perusahaan. Pertanyaannya adalah, “apakah pihak manajemen mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan mereka, bukan pemegang saham (Husnan & Pudjiastuti, 2013).

Konflik lain yang potensial terjadi dalam perusahaan besar adalah antara *stockholders* dan *debtholders*. Kreditur memiliki hak atas sebagian laba yang diperoleh perusahaan dan sebagian asset perusahaan terutama dalam kasus kebangkrutan. Sementara itu pemegang saham

memegang pengendalian perusahaan yang mungkin akan sangat menentukan profitabilitas dan risiko perusahaan. Kreditur memberikan pinjaman kepada perusahaan dengan tingkat bunga yang didasarkan atas (a) risiko asset perusahaan saat ini, (b) risiko yang diharapkan asset di masa datang, (c) struktur modal perusahaan, dan (d) struktur modal perusahaan di masa datang. Faktor-faktor tersebut sangat menentukan risiko aliran kas perusahaan. Misalkan sekarang pemegang saham melalui manajer memutuskan untuk ekspansi yang mengakibatkan risiko perusahaan menjadi lebih besar dari yang diperkirakan oleh kreditur. Kenaikan risiko perusahaan menjadi lebih besar dari yang diperkirakan oleh kreditur. Kenaikan risiko ini tentunya akan mengakibatkan kenaikan tingkat keuntungan yang disyaratkan atas utang dan akhirnya mengakibatkan nilai utang menurun.

Teori agensi digunakan dalam menjelaskan manajemen laba karena manajemen laba merupakan salah satu masalah keagenan yang terjadi karena adanya pemisahan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Manajemen laba yang dilakukan manajer tersebut menyebabkan laporan keuangan yang disajikan tidak berintegritas (tidak jujur dan apa adanya). Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (prinsipal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Namun dalam kenyataannya, yang sering terjadi baik manajemen atau manajer perusahaan sering

mempunyai tujuan yang berbeda yang mungkin bertentangan dengan tujuan utama antara pihak prinsipal. Permasalahan yang timbul akibat adanya konflik kepentingan antara para manajer dan pemegang saham

2. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif adalah teori yang berupaya menjelaskan sebuah proses, yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu dimasa mendatang (Chariri & Ghozali, 2007)

Teori akuntansi positif (*positive accounting theory*) sering dikaitkan dalam pembahasan mengenai manajemen laba (*earnings management*). Teori akuntansi positif menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen dalam memilih prosedur akuntansi yang optimal dan mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori akuntansi positif, prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tidak harus sama dengan yang lainnya, namun perusahaan diberi kebebasan untuk memilih salah satu alternatif prosedur yang tersedia untuk meminimumkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan. Teori akuntansi positif berusaha untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Dengan demikian *positive accountancy theory* dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. (Chariri & Ghozali, 2007).

Ada berbagai motivasi yang mendorong dilakukannya manajemen laba. Teori akuntansi positif (*positive accounting theory*) mengusulkan tiga hipotesis motivasi manajemen laba yang dihubungkan oleh tindakan oportunistik yang dilakukan oleh perusahaan Zimmerman, 1986 dalam (Chariri & Ghozali, 2007). Tiga hipotesis menurut Watts dan Zimmerman (1986) (Chariri & Ghozali, 2007) dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Hipotesis rencana bonus (*bonus plan hypotesis*)

Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan *bonus plan* akan cenderung untuk menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode berjalan. Hal ini dilakukan untuk memaksimumkan bonus yang akan mereka peroleh karena seberapa besar tingkat laba yang dihasilkan seringkali dijadikan dasar dalam mengukur keberhasilan kinerja. Jika besarnya bonus tergantung pada besarnya laba, maka perusahaan tersebut dapat meningkatkan bonusnya dengan meningkatkan laba setinggi mungkin. Dengan demikian, diperkirakan bahwa perusahaan yang mempunyai kebijakan pemberian bonus yang berdasarkan pada laba akuntansi, akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan laba tahun berjalan

b. Hipotesis Hutang/Ekuitas (*debt/equity hypotesis*)

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan di dalam perjanjian utang (*debt covenant*). Sebagian perjanjian hutang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam

selama masa perjanjian. Dinyatakan pula jika perusahaan mulai mendekati suatu pelanggaran terhadap perjanjian hutang (*debt covenant*), maka perusahaan tersebut akan berusaha menghindari terjadinya hutang (*debt covenant*) dengan cara memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba. Pelanggaran terhadap perjanjian hutang dapat menimbulkan suatu biaya serta dapat menghambat kinerja manajemen. Sehingga dengan meningkatkan laba perusahaan berusaha untuk mencegah atau setidaknya menunda hal tersebut.

c. Hipotesis cost politik (*political cost hypothesis*)

Dalam hipotesis ini dinyatakan bahwa semakin besar biaya politik yang dihadapi oleh perusahaan maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan menggunakan pilihan akuntansi yang dapat mengurangi laba, karena perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi dinilai akan mendapat perhatian yang luas dari kalangan konsumen dan media yang nantinya juga akan menarik perhatian pemerintah dan regulator sehingga menyebabkan terjadinya biaya politik, diantaranya muncul intervensi pemerintah, pengenaan pajak yang lebih tinggi, dan berbagai macam tuntutan lain yang dapat meningkatkan biaya politik.

Dari definisi diatas, peneliti dapat melihat hubungan teori akuntansi positif (*positive accounting theory*) dengan penelitian ini. Seperti yang sudah dijelaskan, dalam teori akuntansi positif (*positive*

accounting theory) ada berbagai motivasi yang mendorong dilakukannya manajemen laba.

3. Manajemen Laba

Menurut (Siallagan & Machfoeds, 2006) manajemen laba didefinisikan sebagai suatu tindakan yang terjadi ketika manajer menggunakan kebijakan dalam pelaporan keuangan dan dalam menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan dan menyesatkan *stakeholders* mengenai kinerja ekonomi perusahaan, atau untuk mempengaruhi *contractual outcomes* yang tergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan.

Pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan aktiva sangat tergantung pada ketepatan pengukur kenaikan aktiva sangat tergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. Jadi dalam hal ini laba hanya merupakan angka artikulasi dan tidak didefinisikan tersendiri secara ekonomik seperti halnya aktiva atau hutang (Chariri & Ghozali, 2007).

Para ahli ekonomilah sebenarnya yang memulai membahas masalah konsep laba ini, kemudian profesi akuntan mengikutinya. Adam Smith menjelaskan bahwa *income* adalah kenaikan dalam kekayaan. Pengertian ini diikuti oleh Marshall dan kawan-kawan dan dihubungkannya dalam konsep praktik bisnis. Mereka membedakan

modal tetap dengan modal kerja, modal fisik, dan laba, dan menekankan pada realisasi sebagai pengakuan laba. Von Bohm Bawerk pada akhir abad XIX telah memperkenalkan pendapat bahwa laba bukan saja unsur kas, dia memperkenalkan konsep laba nonmoneter. Kemudian pada awal abad XX Fischer, Lindahl, dan Hick menjelaskan sifat-sifat laba ekonomi mencakup tiga tahap, yaitu sebagai berikut (Harahap, 2012):

- a. *Physical Income*, yaitu konsumen barang dan jasa pribadi yang sebenarnya memberikan kesenangan fisik dan pemenuhan kebutuhan, laba jenis ini tidak dapat diukur.
- b. *Real Income* adalah ungkapan kejadian yang memberikan peningkatan terhadap kesenangan fisik. Ukuran yang dapat digunakan untuk *real income* ini adalah “biaya hidup” (*cost of living*). Dengan perkataan lain, kepuasan timbul karena kesenangan fisik yang timbul dari keuntungan yang diukur dengan pembayaran uang yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa sebelum dan sesudah dikonsumsi.
- c. *Money Income* merupakan hasil uang yang diterima dan dimasukkan untuk konsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Fischer, *money income* lebih dekat pada pengertian akuntansi tentang *income*. Lindahl menganggap konsep laba *interest*, yaitu merupakan penghargaan yang terus-menerus terhadap barang modal sepanjang waktu. Perbedaan antara *interest* dengan konsumsi yang diharapkan

pada periode tertentu dianggap sebagai *saving* sehingga laba dianggap sebagai konsumsi ditambah *saving*.

Laba dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan perusahaan. Pengukuran terhadap laba tidak akan memberikan informasi yang bermanfaat bila tidak menggambarkan sebab-sebab timbulnya laba. (Chariri & Ghozali, 2007) menyatakan ada dua konsep yang digunakan untuk menentukan elemen laba perusahaan yaitu *current operating concept (Earnings)* dan *all inclusive concept of income* (laba komperhensif).

a. Konsep Laba Periode (*Earnings*)

Konsep laba periode dimaksudkan untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan. Efisiensi berhubungan dengan penggunaan sumber-sumber ekonomi perusahaan untuk memperoleh laba. Ukuran efisiensi umumnya dilakukan dengan membandingkan laba periode berjalan dengan laba periode sebelumnya atau dengan laba perusahaan lain pada industri yang sama. Konsep laba periode memusatkan perhatiannya pada laba operasi periode berjalan yang berasal dari kegiatan normal perusahaan. Oleh karena itu, yang termasuk elemen laba adalah peristiwa atau perubahan nilai yang dapat dikendalikan manajemen dan berasal dari keputusan-keputusan periode berjalan. Laba periode tidak memasukkan pengaruh kumulatif perubahan akuntansi tersebut. Jadi yang menjadi penentu

laba periode adalah pendapatan, biaya, untung dan rugi yang benar-benar terjadi pada periode berjalan.

b. Laba Komperhensif (Comprehensive income)

FASB dalam SFAC No 3 dan 6 yang dikutip Ghozali dan Chariri menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan laba komperhensif adalah: *Total perubahan ekuitas bersih (ekuitas) perusahaan selama satu periode yang berasal dari semua transaksi dan kegiatan lain dari sumber selain sumber yang berasal dari pemilik.* Atau dengan kata lain, laba komprehensif terdiri atas seluruh perubahan aktiva bersih yang berasal dari transaksi operasi. FASB menjelaskan bahwa alasan utama digunakannya laba komperhensif adalah untuk membedakannya dengan laba periode.

Kesempatan bagi manajemen untuk mendistorsi laba timbul karena (Brigham & Houston, 2006) :

a. Kelemahan yang inheren dalam akuntansi itu sendiri

Fleksibilitas dalam menghitung angka laba disebabkan oleh metode akuntansi yang memberikan peluang bagi manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, Misalnya mengubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi.

b. Informasi asimetri antara manajer dengan pihak luar

Manajer relatif memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan pihak luar (termasuk investor). Mustahil bagi pihak luar

untuk dapat mengawasi semua perilaku dan semua keputusan manajer secara detail.

Praktek manajemen laba dapat ditinjau dari dua perspektif yang berbeda, yaitu perspektif etika bisnis dan teori akuntansi positif. Dari kacamata etika, dapat dianalisis sebab-sebab manajer melakukan manajemen laba, sementara itu dari kacamata teori akuntansi positif dapat dianalisis dan diidentifikasi sebagai bentuk praktek manajemen laba yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Esensi dari pendekatan moral atau etika adalah mencapai keseimbangan antara kepentingan individu (manajer) dengan kewajiban terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan kepentingan principal dan akhirnya menjadi insentif bagi manajer untuk melakukan manajemen laba (Sulistyanto, 2009).

Faktor-Faktor penyebab munculnya manajemen laba ada tiga yaitu (Sulistyanto, 2009):

a. Manajemen akrual

Manajemen laba biasanya dikaitkan dengan semua aktivitas yang dapat mempengaruhi aliran kas dan keuntungan yang secara pribadi merupakan wewenang dari para manajer.

b. Penerapan suatu kebijakan akuntansi yang wajib

Manajemen laba berkaitan dengan keputusan manajer untuk menerapkan suatu kebijaksanaan akuntansi yang wajib diterapkan oleh perusahaan, yaitu antara menerapkannya lebih awal dari waktu

yang ditetapkan atau menundanya sampai saat berlakunya kebijaksanaan tersebut.

c. Perubahan akuntansi secara sukarela

Manajemen laba berkaitan dengan upaya manajer untuk mengganti atau mengubah suatu metode akuntansi tertentu di antara sekian banyak metode yang dapat dipilih yang tersedia dan diakui oleh badan akuntansi yang ada.

Manajemen laba dilakukan oleh pihak manajer karena motivasi antara lain sebagai berikut (Sulistyanto, 2009) :

- a. *Bonus scheme*, asimetri manajer dengan investor terkait laba yang akan dilaporkan, manajemen laba dilakukan untuk memaksimalkan bonus yang akan diperoleh.
- b. *Political motivation*, perusahaan cenderung menurunkan laba pada waktu tertentu dalam konteks periode kemakmuran tinggi, agar memperoleh kemudahan mendapatkan fasilitas dari pemerintah misalnya subsidi.
- c. *Taxation motivation*, perpajakan salah satu alasan pihak manajer melakukan manajemen laba dengan tujuan memperkecil nilai pajak.
- d. Pergantian CEO, seorang CEO yang mendekati akhir jabatan biasanya berusaha memaksimalkan laba yang dilaporkan agar tingkat bonus yang diperoleh lebih tinggi.
- e. *Initial Public Offering (IPO)* (penawaran pasar perdana), pada saat ini perusahaan biasa meningkatkan laba bersih untuk memperoleh

harga pasar yang lebih tinggi, karena perusahaan dihadapkan pada masalah harga saham yang ditawarkan.

(Belkaoui, 2007) menyebutkan bahwa laba akuntansi mempunyai lima karakteristik sebagai berikut :

- a. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual yang diadakan oleh perusahaan (terutama pendapatan yang berasal dari penjualan barang atau jasa dikurangi biaya yang dibutuhkan untuk mencapai penjualan tersebut)
- b. Laba akuntansi didasarkan pada postulat periodisasi dan mengacu pada kinerja keuangan perusahaan selama satu periode tertentu.
- c. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan.
- d. Laba akuntansi memerlukan pengukuran tentang biaya (*expenses*) dalam bentuk biaya historis.

Laba akuntansi menghendaki adanya penandingan (*matching*) antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut. Tujuan pokok analisa terhadap perhitungan laba rugi adalah untuk membuat proyeksi laba. Proyeksi laba sebenarnya sekaligus mencakup penilaian terhadap kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Hal ini disebabkan untuk bisa membuat proyeksi tentang laba perlu dipahami dan dianalisa faktor –faktor atau unsur-

unsur pokok yang membentuk laba dalam perusahaan yang bersangkutan.

Proyeksi harus didasarkan hasil analisa secara mendalam terhadap tiap-tiap jenis penghasilan dan biaya yang saling berhubungan satu sama lain serta dengan memperhatikan situasi dan kondisi dimasa yang akan datang yang kemungkinan akan mempengaruhinya. Oleh karena itu, membuat proyeksi laba perlu dipelajari dan didasarkan pada hasil analisa dalam beberapa periode. Hal-hal yang bersifat rutin tentu lebih mudah diproyeksikan dan dengan tingkat ketepatan yang lebih baik daripada hal-hal yang tidak rutin. Proyeksi harus didasarkan pada hasil analisa menurut tiap bagian dalam perusahaan untuk beberapa periode. Tiap bagian mempunyai kemampuan untuk memberikan kontribusi terhadap laba keseluruhan yang berbeda, menghadapi tingkat risiko dan kemampuan untuk berkembang yang berbeda pula.

Menurut (Chariri & Ghozali, 2007) informasi tentang laba perusahaan dapat digunakan sebagai :

- a. Indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian (*rate of return on invested capital*).
- b. Pengukur prestasi manajemen
- c. Dasar penentuan besarnya pajak
- d. Alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara
- e. Dasar kompensasi dan pembagian bonus

- f. Alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan
- g. Dasar untuk kenaikan kemakmuran
- h. Dasar pembagian deviden

Adanya berbagai konsep dan tujuan laba, mengakibatkan konsep tunggal tidak dapat memenuhi semua kebutuhan pihak pemakai laporan keuangan. Atas dasar inilah ada dua alternatif yang dapat digunakan, yaitu memformulasikan konsep tunggal untuk memenuhi berbagai tujuan secara umum atau menggunakan berbagai konsep laba dan menyajikan secara jelas konsep laba tersebut secara khusus.

4. Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan menurut SAK untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba menurut aturan perpajakan Indonesia yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46 paragraf 07 aktiva pajak tangguhan didefinisikan sebagai jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi dan sisa kompensasi kerugian yaitu

saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi pada periode yang akan datang (Tundjung, 2015)

(Suandy, 2016) mengungkapkan bahwa apabila pada masa mendatang akan terjadi pembayaran yang lebih besar, maka berdasarkan SAK harus diakui sebagai suatu kewajiban. Sebagai contoh apabila beban penyusutan aset tetap yang diakui secara fiskal lebih besar daripada beban penyusutan aset tetap yang diakui secara komersial sebagai akibat adanya perbedaan metode penyusutan aktiva (aset) tetap, maka selisih tersebut akan mengakibatkan pengakuan beban pajak yang lebih besar secara komersial pada masa yang akan datang. Dengan demikian selisih tersebut akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan ini terjadi apabila rekonsiliasi fiskal berupa koreksi negatif, di mana pendapatan menurut akuntansi komersial lebih besar daripada akuntansi fiskal dan pengeluaran menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada akuntansi fiskal (Agoes & Trisnawati, 2007).

Akuntansi Pajak Tangguhan di Indonesia, akuntansi Pajak Penghasilan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46 paragraf 07 dimana aktiva pajak tangguhan didefinisikan sebagai jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat (Agoes & Trisnawati, 2007):

- a. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan

dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi

- b. Sisa kompensasi kerugian yaitu saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi pada periode yang akan datang.

Dari aspek pengukuran, besarnya nilai tercatat aktiva pajak tangguhan harus ditinjau kembali pada tanggal neraca. Paragraf ini mempunyai implikasi bahwa pernyataan ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan melakukan pengukuran subyektif dan beban atas kememadaian suatu aktiva pajak tangguhan dan prediksi laba fiskal yang akan datang (Agoes & Trisnawati, 2007).

Dari paragraf tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan cadangan dengan penurunan atau kenaikan aktiva atau kewajiban pajak tangguhan bisa dipengaruhi judgment untuk menentukan pembentukan cadangan dan besarnya penghasilan kena pajak yang diperkirakan pada periode fiskal mendatang yang bervariasi secara signifikan tergantung pada lingkungan individual perusahaan. Judgment untuk mempertimbangkan kondisi-kondisi yang bisa bersifat subyektif diatas memungkinkan manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan instrumen akun aktiva pajak tangguhan untuk beberapa motif. Oleh karena angka-angka dalam laporan keuangan dapat memberikan konsekuensi ekonomi, maka tindakan manajemen laba

dapat memberikan gambaran yang tidak fair atas laporan keuangan (Suandy, 2016).

Dari beberapa kesimpulan yang telah diuraikan tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa potensi manajemen laba dapat terjadi dalam menentukan dan mengubah penilaian aktiva pajak tangguhan yang tercermin dalam kenaikan atau penurunan aktiva pajak tangguhan sebagai cadangan, oleh karena itu perlu diperoleh bukti empiris bagaimana perusahaan publik mengimplementasikan PSAK No 46 dan sebuah pedoman yang diperoleh dari fakta empiris variabel-variabel apa yang seharusnya dipertimbangkan dalam melakukan estimasi beban pajak tangguhan yang memadai sesuai dengan yang diamanahkan dalam PSAK No 46. (Tundjung, 2015) membuktikan bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan sebagai alternatif untuk membuktikan probabilitas manajemen laba untuk menghindari kerugian.

5. Perencanaan Pajak

Perencanaan Pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Zain, 2015). Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya, bagi

perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2016).

Ketentuan perpajakan terus mengikuti perubahan dan perkembangan perekonomian negara, masyarakat dan juga mengikuti perkembangan perekonomian dunia, sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kebijakan fiskal, agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya menyejahterakan masyarakat lewat kebijakan fiskal pada semua lapisan masyarakat maupun semua bentuk kegiatan usaha (Muljono, 2014).

Suatu perencanaan pajak yang tepat merupakan hasil dari tindakan penghematan atau *tax saving* dan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. (Muljono, 2014) mengidentifikasi pajak dengan perencanaan pajak dan mendefinisikan perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensi jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu (Suandy, 2016):

a. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)

Kebijakan Perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak (Suandy, 2016) yaitu:

1) Jenis Pajak Yang Akan Dipungut

Dalam sistem perpajakan modern terdapat berbagai jenis pajak yang harus menjadi pertimbangan utama, baik berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung dan cukai 1) pajak penghasilan badan dan orang pribadi, 2) pajak atas keuntungan modal (*capital gains*), 3) *withholding tax* atas gaji, dividen, sewa, bunga, royalti, dan lain-lain 4) pajak atas impor, ekspor dan bea masuk 5) pajak atas undian/hadiah 6) bea meterai 7) *capital transfer taxes/transfer duties* 8) lisensi usaha dan pajak perdagangan lainnya.

2) Subyek pajak

Adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen badan usaha kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha meenyebabkan timbulnya usaha untuk merencanakan pajak dengan baik agar beban pajak rendah sehingga sumber daya perusahaan bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain. Di samping itu, ada pertimbangan untuk menunda pembayaran

dividen dengan cara meningkatkan jumlah laba yang ditahan (*retained earnings*) bagi perusahaan yang juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak (Suandy, 2016).

3) Obyek pajak

Adanya perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama, akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah. Sebagai contoh, transaksi modal perseroan atas dividen dan keuntungan modal; dimana atas pembayaran dividen kepada pemegang saham perorangan diterapkan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, sedangkan keuntungan modal dikenakan pajak dengan tarif tetap besar 0,1% atau 0,6% dari jumlah bruto nilai penjualan saham (Suandy, 2016).

4) Tarif pajak

Adanya penerapan *schedular taxation* tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencanaan pajak berusaha sedapat mungkin agar dikenakan tarif yang paling rendah (*low bracket*) (Suandy, 2016).

5) Prosedur pembayaran pajak

Sistem *self-assessment* dan sistem pembayaran mengharuskan perencanaan pajak untuk merencanakan pajaknya dengan baik. Saat ini sistem pemungutan *withholding tax* di Indonesia makin ditingkatkan penerapannya. Hal ini disamping mengganggu arus

kas perusahaan juga bisa mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pemungutan pendahuluan tersebut, padahal untuk memperoleh restitusi atas kelebihan tersebut diperlukan waktu dan biaya (Suandy, 2016)

b. Undang-Undang Perpajakan (*tax law*)

Kenyataan menunjukkan bahwa di mana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuatan kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik (Suandy, 2016).

c. Administrasi Perpajakan (*tax administration*)

Indonesia merupakan negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan

penafsiran antara rapat fiskus dengan wajib belum efektif (Suandy, 2016).

Agar perencanaan pajak dapat berjalan sesuai dengan tujuan menurut (Suandy, 2016) diperlukan tahapan-tahapan terencana sebagai berikut :

a. Menganalisis informasi (basis data) yang ada

Tahapan pertama dari proses pembuatan tax planning adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

Ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Adalah juga penting untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi.

b. Buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih tindakan berikut ini:

1) Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.

Hampir semua perpajakan internasional paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan dalam hal ini proses perencanaan tidak bisa berada di

luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi dan hubungan yang paling menguntungkan. Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu proyek adalah apabila tidak ada rencana pembatasan minimum pajak yang diterapkan dan apabila ada rencana pembatasan minimum diterapkan, berhasil atau pun gagal.

- 2) Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut. Dalam rencana perpajakan internasional mungkin diberi perlakuan khusus dengan memilih antara dua atau lebih kemungkinan investasi di negara-negara berbeda.
- 3) Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.

Dalam banyak kasus, pertimbangan penghematan pajak tidak hanya di pengaruhi oleh pemilihan yang hati-hati dari bentuk transaksi, operasi maupun hubungan internasional, tetapi juga oleh penggunaan satu atau lebih negara sebagai tambahan dari negara yang bersangkutan yang sudah ada dalam data base. Perencanaan pajak internasional sebetulnya merupakan perluasan yang sederhana dari perencanaan pajak nasional. Dalam membuat model pengaturan yang paling tepat, penting sekali untuk mempertimbangkan.

- 4) Apakah kepemilikan dari hak, surat berharga, dan lain-lain harus dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan, individu, atau kombinasi dari semuanya itu.
- 5) Adakah hubungan antara berbagai individu dan entitas.

c. Evaluasi perencanaan pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak.

d. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan.

e. Memuktahirkan rencana pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga masih perlu mempertimbangkan setiap perubahan yang terjadi baik undang-undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi di luar

negeri atas berbagai macam pajak maupun aktifitas informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas.

Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial

6. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan total asset. Aset adalah kekayaan (sumber daya) yang dimiliki oleh entitas bisnis yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta sistem pengurutannya berdasar pada seberapa cepat perubahannya dikonversi menjadi satuan uang kas (Munawir, 2010). Aset adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Yang dapat dimasukkan ke dalam kolom asset salah satunya adalah gedung atau bangunan. Jadi kalau suatu perusahaan memiliki gedung senilai satu miliar rupiah, maka asset yang dihitung adalah satu miliar rupiah itu.

Aset yang dimiliki perusahaan adalah bagian yang sangat penting dalam kelangsungan operasional perusahaan. Melalui aset tersebut, perusahaan dapat menggaji karyawan, membeli barang dari supplier, dan melakukan penjualan yang dapat menambah aset perusahaan.

Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi pada tiga kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan perusahaan ini didasarkan pada total asset perusahaan. Kategori ukuran perusahaan yaitu:

a. Perusahaan Besar

Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp 50 Milyar/tahun.

b. Perusahaan Menengah

Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan kurang dari Rp 50 Milyar.

c. Perusahaan Kecil

Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp 1 Milyar/tahun.

Menurut (Sawir, 2013) ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap studi untuk alasan yang berbeda: Pertama, ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Perusahaan kecil umumnya kekurangan akses ke pasar modal yang terorganisir, baik untuk obligasi maupun saham. Meskipun mereka memiliki akses, biaya peluncuran dari penjualan sejumlah kecil sekuritas dapat menjadi penghambat. Jika penerbitan sekuritas dapat

dilakukan, sekuritas perusahaan kecil mungkin kurang dapat dipasarkan sehingga membutuhkan penentuan harga sedemikian rupa agar investor mendapatkan hasil yang memberikan return lebih tinggi secara signifikan.

Kedua, ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar dalam kontrak keuangan. Perusahaan besar biasanya dapat memilih pendanaan dari berbagai bentuk hutang, termasuk penawaran spesial yang lebih menguntungkan dibandingkan yang ditawarkan perusahaan kecil. Semakin besar jumlah uang yang digunakan, semakin besar kemungkinan pembuatan kontrak yang dirancang sesuai dengan preferensi kedua pihak sebagai ganti dari penggunaan kontrak standar hutang.

Ketiga, ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return membuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba. Pada akhirnya, ukuran perusahaan diikuti oleh karakteristik lain yang mempengaruhi struktur keuangan. Karakteristik lain tersebut seperti perusahaan sering tidak mempunyai staf khusus, tidak menggunakan rencana keuangan, dan tidak mengembangkan system akuntansi mereka menjadi suatu sistem manajemen. Ukuran suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Menurut (Munawir, 2010) laporan keuangan merupakan dua daftar yang disusun oleh akuntansi pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi-laba.

B. Studi Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah :

Tabel 2.1
Studi Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Aditama dan Purwaningsih (2013)	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan NonManufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Berdasarkan hasil analisa data, terlihat bahwa perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI. Akan tetapi, hasil pada analisis deskriptif menunjukkan bahwa 77 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini melakukan perencanaan pajak dengan cara menghindari penurunan laba.
2.	Sumomba (2013)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertama, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak dapat digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba. ▪ Kedua, manajemen selalu merespon perubahan tarif pajak, baik itu kenaikan tarif pajak atau penurunan tarif pajak yang dianggap oleh manajemen sebagai peluang “emas” untuk memberikan profit bagi perusahaan baik pada periode tersebut maupun periode yang akan datang. ▪ Ketiga, respon manajemen atas perubahan tarif pajak tersebut akan mempengaruhi posisi beban pajak tangguhan
3.	Santana (2016)	Pengaruh Perencanaan Pajak, Kepemilikan	Hasil pengujian menunjukan perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap praktek manajemen

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Manajerial Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktek Manajemen Laba	laba, sedangkan kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan menunjukan hasil tidak berpengaruh.
4.	Setyawan (2016)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Profitabilitas, Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. ▪ Profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba ▪ Perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba ▪ Leverage memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba dan terbukti sebagai Variabel Kontrol

Sumber: Data yang diolah (2019)

C. Kerangka Pemikiran

Sekaran (2011 : 60) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

1. Pengaruh Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Teori agensi menyatakan dalam meminimalkan tingkat kesalahan informasi, diperlukan pengawasan langsung dan kesalahan tersebut

merupakan salah satu bukti lemahnya pengawasan serta pengendalian dari wakil prinsipal. Semakin besarnya motivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba akan menyebabkan semakin besarnya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba perpajakan Mills dan Newberry, 2001 dalam (Tundjung, 2015).

Yulianti (2004) membuktikan bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan sebagai alternatif untuk membuktikan probabilitas manajemen laba untuk menghindari kerugian. Dalam melanjutkan hasil yang didapat tersebut, Philips, et al (2004) dalam (Tundjung, 2015) menginvestigasi perusahaan-perusahaan yang terkait melakukan manajemen laba dengan perubahan dari komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan (kewajiban pajak tangguhan bersih) yang merupakan refleksi dari nilai beban pajak tangguhan pada laporan laba rugi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sumomba, 2013) membuktikan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Setyawan, 2016) membuktikan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

2. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Peran perencanaan pajak dalam praktik manajemen laba secara konseptual dapat dijelaskan dengan teori keagenan dan teori akuntansi positif. Pada teori keagenan, dalam hal ini pemerintah (fiskus) sebagai pihak *principal* dan manajemen sebagai pihak *agent* masing-masing

memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Perusahaan (*agent*) berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Di lain pihak, pemerintah (*principal*) memerlukan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, terjadi konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah, sehingga memotivasi agent meminimalkan beban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah (Hidayati & Zulaika, 2003).

Agar nilai saham perusahaan meningkat, maka manajemen termotivasi untuk memberikan informasi kinerja perusahaan yang sebaik mungkin. Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan untuk mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan (Aditama & Purwaningsih, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh (Aditama & Purwaningsih, 2013) dan Setywan (2013) membuktikan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Sumomba, 2013) dan (Santana & Wirakusuma, 2016) membuktikan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba.

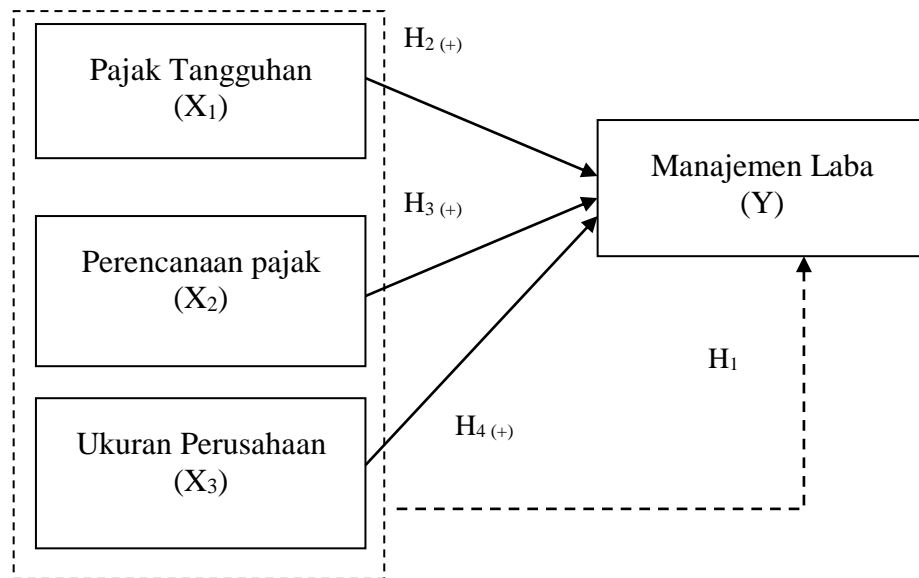
3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba

Terdapat dua pandangan tentang bentuk hubungan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Pandangan pertama menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dengan manajemen laba, karena perusahaan besar memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan kecil, sehingga lebih memungkinkan untuk melakukan manajemen laba. Pandangan kedua menyatakan ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba (Muliati, 2011).

Semakin besar aset perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam saham perusahaan tersebut semakin banyak. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat (Nasution & Setiawan, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Santana (2016) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Muliati, 2011) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

D. Perumusan Hipotesis

Sekaran (2011:135) mengemukakan pengertian hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh pajak tangguhan, perencanaan pajak dan ukuran perusahaan secara bersama-sama terhadap manajemen laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018.

2. Terdapat pengaruh positif pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018.
3. Terdapat pengaruh positif perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018.
4. Terdapat pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pemilihan Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif yaitu suatu penelitian yang dituntut untuk menggunakan angka, nilai dari hasil penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasil dari penelitian yang menggunakan statistik, sehingga kesimpulan yang diperolehnya dapat dirumuskan dalam data yang berupa angka mengenai manajemen laba.

B. Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tergabung dalam perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling method*. Perusahaan yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang tergabung dalam perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 6 tahun berturut-turut yaitu tahun 2013-2018, karena perusahaan farmasi lebih mudah terpengaruh oleh

kondisi ekonomi dan memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap kejadian internal dan eksternal perusahaan.

- b. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.
- c. Perusahaan tidak melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi, serta perubahan kelompok usaha. Adanya akuisisi, merger, restrukturisasi, serta perubahan kelompok usaha tersebut akan menyebabkan laporan keuangan disajikan berbeda sehingga mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan perusahaan.
- d. Berikut ini akan dijelaskan tahapan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1.
Tahapan Pengambilan Sampel

Keterangan	Jumlah
Total perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	10
Perusahaan yang pernah delisting	(0)
Perusahaan yang memiliki data tidak lengkap	(3)
Jumlah perusahaan sampel	7
Jumlah data observasi (7 perusahaan x 6 tahun)	42

Berdasarkan kriteria *purposive sampling* dengan tahapan pengambilan sampel di atas, maka terdapat 7 perusahaan yang memenuhi kriteria dijadikan sampel yaitu:

Tabel 3.2.
Sampel Penelitian

No.	Kode Saham	Nama Emiten
1.	DVLA	PT. Darya Varia Laboratories Tbk
2.	INAF	PT. Indofarma (Persero) Tbk
3.	KAEF	PT. Kimia Farma (Persero) Tbk
4.	MERK	PT. Merck Indonesia Tbk
5.	PYFA	PT. Pyridam Farma Tbk
6.	KLBF	PT. Kalbe Farma Tbk
7.	TSPC	PT. Tempo Scan Pasific Tbk

Sumber: diolah untuk penelitian

C. Definisi Konseptual dan Operasional variabel

Definisi konseptual adalah adalah penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas. Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah :

1. Manajemen Laba (Y)

Manajemen laba adalah suatu tindakan yang terjadi ketika manajer menggunakan kebijakan dalam pelaporan keuangan dan dalam menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan dan menyesatkan *stakeholders* mengenai kinerja ekonomi perusahaan, atau untuk mempengaruhi *contractual outcomes* yang tergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan (Sulistyanto, 2009).

Berdasarkan penelitian Phillips etal (2003 dalam Aditama dan Purwaningsih, 2013) rumus untuk variabel manajemen laba diukur dengan menggunakan pendekatan distribusi laba sebagai berikut :

$$\Delta E = \frac{E_{it} - E_{it-1}}{MVE_{t-1}}$$

Keterangan :

ΔE : Distribusi laba, dimana bila nilai ΔE adalah nol atau positif, maka perusahaan menghindari penurunan laba dan melakukan manajemen laba. Bila nilai ΔE adalah negatif, perusahaan menghindari pelaporan kerugian dan melakukan perencanaan pajak.

E_{it} :Laba perusahaan i pada tahun t

E_{it-1} :Laba perusahaan i tahun t-1

MVE_{t-1} : Market Value of Equity Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tingkat kapitalisasi sebagai proksi *market value of equity*. Nilai kapitalisasi tersebut diukur dengan mengalikan jumlah saham beredar perusahaan i pada akhir tahun t-1 dengan harga saham perusahaan i pada akhir tahun t-1.

2. Pajak Tangguhan (X_1)

Beban pajak tangguhan dikelompokkan berdasarkan perbedaan temporer dan perbedaan permanen. pajak secara final, dan adanya *non deductible expense* (biaya yang tidak boleh dikurangkan) (Suandy, 2016). Informasi mengenai beban pajak tangguhan diperoleh di neraca sisi liability.

3. Perencanaan Pajak (X_2)

Perencanaan pajak tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya (Suandy, 2016).

Ukuran efektifitas manajemen pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran efektifitas perencanaan pajak. Rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak) adalah (Wild *et al.*, 2004 dalam Aditama dan Purwaningsih, 2013):

$$TRR = \frac{Net\ Income_{it}}{Pretax\ Income\ (EBIT)_{it}}$$

Keterangan :

TRR_{it} : *Tax Retention Rate* (tingkat retensi pajak) perusahaan i pada tahun t

$Net\ Income_{it}$: Laba bersih perusahaan i pada tahun t

Pretax Income ($EBIT_{it}$) : Laba sebelum pajak perusahaan i pada tahun t

Semakin rendah *tax retention rate* berarti perusahaan melakukan perencanaan pajak.

4. Ukuran perusahaan (X_3)

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan (Dewi & Ulupui, 2014).

Operasional variabel merupakan proses penguraian variabel penelitian ke dalam subvariabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Berikut ini akan dijelaskan operasional variable dalam penelitian ini :

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
Manajemen Laba (Y) (Aditama dan Purwaningsih, 2013)	Suatu tindakan yang terjadi ketika manajer mengubah laporan keuangan dan menyesatkan <i>stakeholders</i> mengenai kinerja ekonomi perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bila nilai ΔE adalah nol atau positif, maka perusahaan menghindari penurunan laba. ▪ Bila nilai ΔE adalah negatif, maka perusahaan menghindari pelaporan kerugian <p>Rumus yang digunakan adalah:</p> $\Delta E = \frac{E_{it} - E_{it-1}}{MVE_{t-1}}$ <p>Keterangan: ΔE : Distribusi laba E_{it} : Laba perusahaan i pada tahun t E_{it-1} : Laba perusahaan i tahun t-1 MVE_{t-1} : Market Value of Equity</p>	Rasio
Pajak Tangguhan (Suandy, 2016)	Beban pajak tangguhan dikelompokkan berdasarkan perbedaan temporer dan perbedaan permanen. pajak secara final, dan adanya non deductible expense (biaya yang tidak boleh dikurangkan)	<p>Variabel beban pajak tangguhan diukur diukur dengan membagi jumlah beban pajak tangguhan dengan total aset</p> $DTE = \frac{\text{Deferred Tax Expense}}{\text{Total Assets}}$	Rasio

Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
Perencanaan pajak (X_1) (Suandy, 2016)	Perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku	Variabel perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus <i>tax retention rate</i> (tingkat retensi pajak), yang menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan. Rumus yang digunakan adalah: $TRR = \frac{Net\ Income_{it}}{Pretax\ Income\ (EBIT)_{it}}$ Keterangan: TRR_{it} : <i>Tax Retention Rate</i> (tingkat retensi pajak) perusahaan i pada tahun t $Net\ Income_{it}$: Laba bersih perusahaan i pada tahun t $Pretax\ Income\ (EBIT)_{it}$: Laba sebelum pajak perusahaan i pada tahun t	Rasio
Ukuran perusahaan (X_3) (Dewi & Ulupui, 2014)	Ukuran Perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aktiva, nilai pasar saham, dan lain-lain	Logaritma natural total aset/aktiva. Rumus yang digunakan adalah: $Size = \log (Total\ Aktiva)$	Rasio

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini masalah yang akan diteliti adalah perencanaan pajak dan manajemen laba. Data sekunder berisi tentang data-data annual report yang mencakup data perencanaan pajak dan manajemen laba serta

rasio keuangan perusahaan manufaktur sektor farmasi yang terdaftar di BEI untuk periode 2013-2017.

E. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS Versi 22.00.

F. Analisis Data dan Uji Hipotesis

1. Pengujian Asumsi Klasik

Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Suatu model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi asumsi klasik yaitu, asumsi normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Model regresi yang memenuhi asumsi normalitas apabila data tersebut menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal (Ghozali, 2011).

b. Multikolinieritas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel–variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol (Ghozali, 2011). Variabel yang menyebabkan multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance maupun VIF (*Variance Inflation Factor*). Model regresi yang bebas multikolineritas mempunyai nilai $VIF < 10$ dan mempunyai angka *tolerance* $> 0,1$ atau mendekati 1 (Ghozali, 2011).

c. Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011: 110). Uji Autokorelasi dapat dilakukan melalui Run Test. Uji ini merupakan bagian dari statistik non-parametric yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai Asymp. Sig (2-tailed) uji Run Test. Apabila nilai Asymp.Sig (2-tailed) lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Uji run test akan memberikan kesimpulan yang lebih pasti jika terjadi masalah pada Durbin Watson Test yaitu nilai d terletak antara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$ yang akan

menyebabkan tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti atau pengujian tidak meyakinkan jika menggunakan DW test (Ghozali, 2011:103)

d. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada atau tidaknya problem heteroskedastisitas pada model regresi dapat dideteksi dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu yang teratur pada grafik scatterplot serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2011).

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Persamaan regresi :

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

\hat{Y} : Manajemen laba

a : Konstanta

$b_{1,2,3}$: Koefisien regresi

X_1 : Pajak tangguhan

X_2 : Perencanaan pajak

X_3 : Asset perusahaan

e = epsilon (kesalahan pengganggu/*disturbance error's*)

3. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Tingkat signifikansi atau probabilitasnya adalah sebesar 5% atau 0,05. Dasar penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut (Ghozali, 2011):

- a. Jika nilai signifikan $p < 0,025$ maka hipotesis diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikan $p > 0,025$ maka hipotesis ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

4. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Tingkat signifikansi atau probabilitasnya adalah sebesar 5% atau 0,05. Dasar penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut (Ghozali, 2011):

- a. Jika nilai signifikan $p < 0,025$ maka hipotesis diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikan $p > 0,025$ maka hipotesis ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen

5. Koefisien Determinasi

Dalam uji regresi linier berganda dianalisis pula besarnya koefisien determinasi (r^2) keseluruhan. r^2 digunakan untuk mengukur ketepatan yang paling baik dari analisis regresi berganda. Jika r^2 mendekati 1 (satu) maka dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika r^2 mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variabel bebas menerangkan variabel terikat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Deskripsi BEI

Pasar modal yang dikenal sekarang ini di Indonesia sebenarnya bukanlah merupakan suatu produk baru. Jauh sebelum Negara republic ini diproklamasikan yaitupada zaman Pemerintahan Kolonial Belanda didirikan dengan tujuan untuk menghimpun dana guna menunjang ekspansi usaha perkebunan milik Kolonial Belanda di Indonesia. Para investor yang berkecimpung di pasar modal pada waktu itu adalah orang-orang Belanda dan Eropa lainnya. Munculnya pasar modal di Indonesia secara resmi diawali dengan didirikannya Vereninging Voor de Effectenhandel di Batavia (Jakarta) pada tanggal 14 Desember 1912.

Dengan melihat dampak positif pengoperasian bursa efek di Batavia, Pemerintah Kolonial Belanda terdorong untuk membuka bursa efek di kota lainnya yaitu Surabaya tanggal 11 Januari 1925 dan Semarang tanggal 1 Agustus 1925. Perkembangan pasar modal pada saat ini cukup menggembirakan. Nilai efek yang tercatat sudah mencapai NIF 1,4 miliar yang merupakan pencerminan dari 250 macam efek. Kalau angka ini diindekskan dengan harga beras pada tahun 1982, nilainya cukup besar yaitu lebih kurang Rp 7 triliun.

Permulaan tahun 1939 terjadi gejolak politik di Eropa yang memengaruhi perdagangan efek di Indonesia. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan ini Pemerintah Hindia Belanda mengambil kebijaksanaan untuk memuaskan perdagangan efek di Batavia dengan menutup bursa efek di Surabaya dan Semarang. Kemudian, pecahnya bursa efek di Batavia pada tanggal 10 Mei 1940. Dengan ditutupnya ketiga bursa efek tersebut otomatis aktivitas perdagangan efek menjadi terhenti.

Setelah adanya pengakuan kedaulatan dari Pemerintah Hindia Belanda, Pemerintah Republik Indonesia berusaha untuk mengaktifkan kembali bursa efek Indonesia. Langkah konkret yang diambil oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tanggal 1 September 1951, yang kemudian ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Bursa. Berdasarkan pada undang-undang tersebut maka bursa efek dibuka kembali pada tanggal 11 Juni 1952 dan penyelenggaraannya diserahkan kepada Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE) yang terdiri dari 3 bank Negara dan beberapa makelar efek lainnya dengan Bank Indonesia sebagai penasehat. Sejak itu bursa efek berkembang kembali dengan cukup pesat, meskipun efek yang diperdagangkan adalah efek yang dikeluarkan sebelum Perang Dunia II. Aktivitas ini semakin meningkat sejak Bank Industri Negara (sekarang Bapindo) mengeluarkan pinjaman obligasi berturut-turut tahun 1954, 1955, dan 1956. Para pembeli obligasi ini masih kebanyakan orang Belanda, baik perorangan maupun badan hukum.

Namun keadaan ini berlangsung sampai pada tahun 1958, karena setelah itu Bursa Efek Jakarta mengalami kelesuan sebagai akibat politik konfrontasi yang dilancarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap Pemerintah Belanda dan disusul nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia serta larangan untuk memperdagangkan semua efek dalam bentuk mata uang Nf. Inflasi yang cukup tinggi pada awal 1960-an dan mencapai puncaknya pada tahun 1966, mengakibatkan iklim pasar modal semakin suram. Nilai saham dan obligasi mengalami penurunan yang drastis dan keadaan ini menurunkan kepercayaan para investor pada tingkat terendah terhadap pasar modal.

Di zaman Pemerintahan Orde Baru, pemerintah berturut-turut mengambil langkah-langkah perbaikan yaitu menekan laju inflasi dan memperbaiki perekonomian nasional. Usaha tersebut telah menunjukkan hasil gemilang terbukti dari keberhasilan pemerintah untuk menekan laju inflasi hingga 12% pada tahun 1977. Keadaan ini memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah dan merupakan pertanda positif untuk mulai mengaktifkan kembali pasar modal. Pada tanggal 10 Agustus 1977, Bapak Presiden secara resmi membuka pasar modal di Indonesia yang ditandai dengan *go public*-nya PT. Semen Cibinong.

2. Deskripsi Perusahaan Sampel

Berikut ini adalah profil perusahaan manufaktur sub sektor perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang merupakan sampel dari penelitian ini:

a. PT. Darya Varia Laboratories Tbk

Darya-Varia Laboratoria Tbk ([DVLA](#)) didirikan tanggal 30 April 1976 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1976. Induk usaha Darya-Varia Laboratoria Tbk adalah Blue Sphere Singapore Pte Ltd (menguasai 92,66% saham DVLA), merupakan afiliasi dari United Laboratories Inc, perusahaan farmasi di Filipina. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan DVLA adalah bergerak dalam bidang manufaktur, perdagangan, jasa dan distribusi produk-produk farmasi, produk-produk kimia yang berhubungan dengan farmasi, dan perawatan kesehatan. Kegiatan utama DVLA adalah menjalankan usaha manufaktur, perdagangan dan jasa atas produk-produk farmasi. Merek-merek yang dimiliki oleh Darya-Varia, antara lain: Natur-E, Enervon-C, Decolgen, Neozepe, Cetapain, Paracetamol Infuse, dan Prodiva.

b. PT. Indofarma (Persero) Tbk

Pada awalnya, INAF merupakan sebuah pabrik obat yang didirikan pada tahun 1918 dengan nama pabrik Obat Manggarai. Pada tahun 1950, Pabrik Obat Manggarai ini diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dikelola oleh Departemen Kesehatan. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan INAF adalah melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang farmasi, diagnostik, alat kesehatan,

serta industri produk makanan. Saat ini, Indofarma telah memproduksi sebanyak hampir 200 jenis obat yang terdiri dari beberapa kategori produk, yaitu Obat Generik Berlogo (OGB), Over The Counter (OTC), obat generik bermerek, dan lain-lain.

c. PT. Kimia Farma (Persero) Tbk

Kimia Farma mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1817 yang pada saat itu bergerak dalam bidang distribusi obat dan bahan baku obat. Pada tahun 1958, pada saat Pemerintah Indonesia menasionalisasikan semua Perusahaan Belanda, status KAEF tersebut diubah menjadi beberapa Perusahaan Negara (PN). Pada tahun 1969, beberapa Perusahaan Negara (PN) tersebut diubah menjadi satu Perusahaan yaitu Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan Bhinneka Kimia Farma disingkat PN Farmasi Kimia Farma. Pada tahun 1971, berdasarkan Peraturan Pemerintah status Perusahaan Negara tersebut diubah menjadi Persero dengan nama PT Kimia Farma (Persero).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan KAEF adalah menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi khususnya bidang industri kimia, farmasi, biologi, kesehatan, industri makanan/minuman dan apotik. Saat ini, Kimia Farma telah memproduksi sebanyak 361 jenis obat yang terdiri dari beberapa kategori produk, yaitu obat generik, produk kesehatan konsumen (Over

The Counter (OTC), obat herbal dan komestik), produk etikal, antiretroviral, narkotika, kontrasepsi, dan bahan baku.

d. PT. Merck Indonesia Tbk

Merck Tbk (dahulu PT Merck Indonesia Tbk) ([MERK](#)) didirikan 14 Oktober 1970 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1974. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan MERK adalah bergerak dalam bidang industri, perdagangan, jasa konsultasi manajemen, jasa penyewaan kantor/properti dan layanan yang terkait dengan kegiatan usaha. Kegiatan utama Merck saat ini adalah memasarkan produk-produk obat tanpa resep dan obat peresepan; produk terapi yang berhubungan dengan kesuburan, diabetes, neurologis dan kardiologis; serta menawarkan berbagai instrumen kimia dan produk kimia yang mutakhir untuk bio-riset, bio-produksi dan segmen-segmen terkait. Merek utama yang dipasarkan Merck adalah Sangobion dan Neurobion.

e. PT. Pyridam Farma Tbk

Pyridam Farma Tbk ([PYFA](#)) didirikan dengan nama PT Pyridam pada tanggal 27 Nopember 1977 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1977. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan PYFA meliputi industri obat-obatan, plastik, alat-alat kesehatan, dan industri kimia lainnya, serta melakukan perdagangan, termasuk impor, ekspor dan antar pulau, dan bertindak selaku agen, grosir, distributor dan penyalur dari segala

macam barang. Kegiatan usaha Pyridam Farma meliputi produksi dan pengembangan obat-obatan (farmasi) serta perdagangan alat-alat kesehatan.

f. PT. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk

Merck Sharp Dohme Pharma Tbk (dahulu PT Schering-Plough Indonesia Tbk) ([SCPI](#)) didirikan dengan nama PT Essex Indonesia pada 07 Maret 1972 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Januari 1975. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan SCPI meliputi: pembuatan, pengemasan, pengembangan dan memasarkan produk farmasi untuk manusia dan hewan, produk kebersihan, kosmetik, keperluan rumah tangga dan sejenisnya; Distributor utama atas alat-alat kesehatan; Mengimpor bahan baku, barang jadi dan alat-alat kesehatan terkait; Menyediakan pemberian jasa konsultasi bisnis dan manajemen. Merck memiliki unit usaha Primary Care (menjual produk perawatan kulit, obat antibiotik, alergi, kardiovaskuler) dan Specialty Care (menjual produk hepatologi dan onkologi dan produk untuk mengatasi ketergantungan opiat) serta Organon BioScience (OBS) (menjual produk kesehatan wanita, anestesi dan produk fertilitas).

g. PT. Kalbe Farma Tbk

Kalbe Farma Tbk ([KLBF](#)) didirikan tanggal 10 September 1966 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1966. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan

KLBF meliputi, antara lain usaha dalam bidang farmasi, perdagangan dan perwakilan. Saat ini, KLBF terutama bergerak dalam bidang pengembangan, pembuatan dan perdagangan sediaan farmasi, produk obat-obatan, nutrisi, suplemen, makanan dan minuman kesehatan hingga alat-alat kesehatan termasuk pelayanan kesehatan primer.

Produk-produk unggulan yang dimiliki oleh Kalbe, diantaranya obat resep (Brainact, Cefspan, Mycoral, Cernevit, Cravit, Neuralgin, Broadced, Neurotam, Hemapo, dan CPG), produk kesehatan (Promag, Mixagrip, Extra Joss, Komix, Woods, Entrostop, Procold, Fatigon, Hydro Coco, dan Original Love Juice), produk nutrisi mulai dari bayi hingga usia senja, serta konsumen dengan kebutuhan khusus (Morinaga Chil Kid, Morinaga Chil School, Morinaga Chil Mil, Morinaga BMT, Prenagen, Milna, Diabetasol Zee, Fitbar, Entrasol, Nutrive Benecol dan Diva).

h. PT. Tempo Scan Pasific Tbk

Tempo Scan Pacific Tbk ([TSPC](#)) didirikan di Indonesia tanggal 20 Mei 1970 dengan nama PT Scanchemie dan memulai kegiatan komersialnya sejak tahun 1970. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan TSPC bergerak dalam bidang usaha farmasi. Saat ini, kegiatan usaha TSPC adalah farmasi (obat-obatan), produk konsumen dan komestika dan distribusi.

Produk-produk Tempo Scan yang telah dikenal masyarakat, diantaranya produk kesehatan (Bodrex, Hemaviton, NEO rheumacyl,

Oskadon, Ipi Vitamin, Brodexin, Contrex, Contrexyn, Vidoran, Zevit dan Neo Hormoviton), obat resep dan rumah sakit (Hospira, SciClone, Alif, Ericaf, Timoc, Triptagic dan Trozyn) serta produk konsumen dan komestika (Marina, My Baby, Total Care, S.O.S antibakterial, Claudia, Dione Kids, Tamara, Natural Honey dan Revlon).

B. Deskripsi Data Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018 yang berjumlah 7 perusahaan. Data yang diambil berasal dari data di publikasi laporan keuangan dari website Bursa efek Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan independen. Variabel independen dari penelitian ini adalah pajak tangguhan, perencanaan pajak dan ukuran perusahaan sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Berikut akan dijelaskan statistik deskriptif dari variabel-variabel tersebut. Data statistik deskriptif ini bertujuan untuk menampilkan informasi-informasi yang relevan yang terkandung dalam data tersebut.

Deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data berupa rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum yang dilakukan pada variabel pajak tangguhan, perencanaan pajak, ukuran perusahaan dan manajemen laba.

Tabel 4.1
Data Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total Aset	42	11.980	16.679	14.47421	1.396603
Pajak Tangguhan	42	-7.383	8.688	.26262	3.309916
Perencanaan Pajak	42	.157	.918	.72974	.113461
Manajemen Laba	42	-.107	.079	.03844	.031949
Valid N (listwise)	42				

1. Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan dikelompokkan berdasarkan perbedaan temporer dan perbedaan permanen. pajak secara final, dan adanya *non deductible expense* (biaya yang tidak boleh dikurangkan)

Tabel 4.1. di atas menjelaskan mengenai variabel pajak tangguhan dari perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018. Pajak tangguhan yang tertinggi selama tahun 2013-2018 adalah sebesar 8.688; sedangkan pajak tangguhan terendah selama tahun 2013-2018 adalah sebesar -7.383. Rata-rata pajak tangguhan dari perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013-2018 adalah 14.47421 dengan standar deviasi sebesar 1.396603.

2. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Perencanaan

pajak dilakukan tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Ukuran efektifitas manajemen pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran efektifitas perencanaan pajak. Variabel perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak), yang menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan.

Tabel 4.1. di atas menjelaskan mengenai variabel perencanaan pajak dari perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018. Perencanaan pajak tertinggi selama tahun 2013-2018 adalah sebesar 198%; sedangkan perencanaan pajak terendah selama tahun 2013-2018 adalah sebesar 15,7%. Rata-rata perencanaan pajak dari perusahaan perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013-2018 adalah 72,97% dengan standar deviasi sebesar 0,113461.

3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Ukuran Perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aktiva, nilai pasar saham, dan lain-lain

Tabel 4.1. di atas menjelaskan mengenai variabel ukuran perusahaan dari perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018. Ukuran perusahaan tertinggi selama tahun 2013-2018 adalah sebesar

16.679; sedangkan ukuran perusahaan terendah selama tahun 2013-2018 adalah sebesar 11.980. Rata-rata ukuran perusahaan dari perusahaan perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013-2018 adalah 14.47421 dengan standar deviasi sebesar 1.396603.

4. Manajemen Laba

Manajemen laba adalah suatu tindakan yang terjadi ketika manajer menggunakan kebijakan dalam pelaporan keuangan dan dalam menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan dan menyesatkan *stakeholders* mengenai kinerja ekonomi perusahaan, atau untuk mempengaruhi *contractual outcomes* yang tergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan. Berdasarkan penelitian Aditama dan Purwaningsih (2013) rumus untuk variabel manajemen laba diukur dengan menggunakan pendekatan distribusi laba

Tabel 4.1. di atas menjelaskan mengenai variabel manajemen laba dari perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018. Manajemen laba yang tertinggi selama tahun 2013-2018 adalah sebesar 7,9%; sedangkan manajemen laba terendah selama tahun 2013-2018 adalah sebesar -10,7%. Rata-rata manajemen laba dari perusahaan perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013-2018 adalah 3,84% dengan standar deviasi sebesar 0,031949.

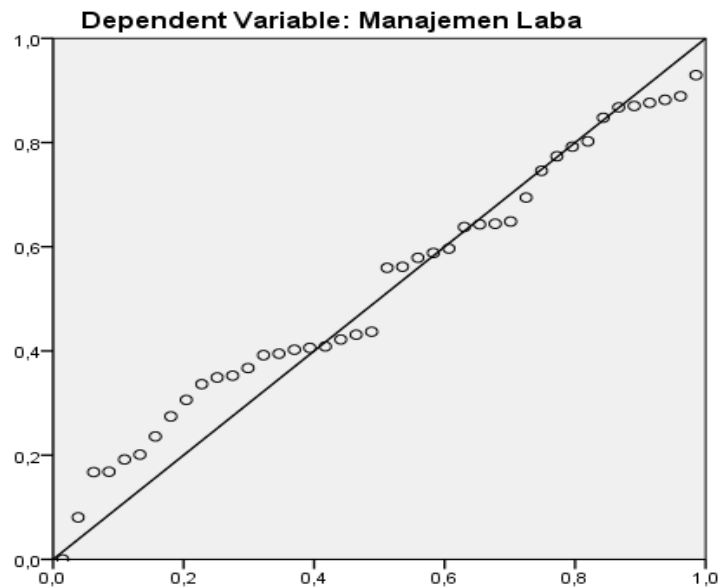
C. Analisis Data dan Uji Hipotesis

1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik agar model regresi dapat menjadi suatu model yang representatif. Uji asumsi klasik adalah asumsi dasar yang harus dipenuhi dalam model regresi. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2011: 160).



Gambar 4.1
Hasil Pengujian Normalitas

Berdasarkan hasil dari uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat bahwa titik-titik tidak menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya tidak mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penyebaran data dalam penelitian ini tidak normal.

Uji normalitas melalui grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, pada hal statistik bisa sebaliknya. Oleh karena itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik, sehingga uji yang digunakan adalah uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan melihat nilai dari *Asymp. Sig. (2-tailed)*, apabila nilai dari *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka hal ini menandakan bahwa data residual terdistribusi normal (Ghozali, 2011: 163).

Tabel 4.2
Data Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.02876324
Most Extreme Differences	Absolute	.116
	Positive	.079
	Negative	-.116
Test Statistic		.116
Asymp. Sig. (2-tailed)		.175 ^c

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai *kolmogorov smirnov* dengan menggunakan one sample *kolmogorov smirnov* pada *unstandardized residual* diperoleh hasil sebesar 0,175. Perbandingan antara *probability* dengan standar signifikansi yang sudah ditentukan diketahui bahwa nilai *probability* dari semua variabel lebih besar dari 0,05. Sehingga menunjukkan bahwa distribusi data dalam penelitian ini normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel *independen*. Jika variabel *independen* saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak *orthogonal*. *Orthogonal* yang dimaksud mengandung makna tidak saling mempengaruhi atau tidak saling menginterferensi.

Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan direges terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Cara untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat pada *Variance Inflation Factor* (VIF). Batas VIF adalah 10. Jika nilai VIF diatas 10 maka terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.3
Hasil Pengujian Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Total Aset	,930	1,075
	Pajak Tangguhan	,818	1,222
	Perencanaan Pajak	,863	1,159

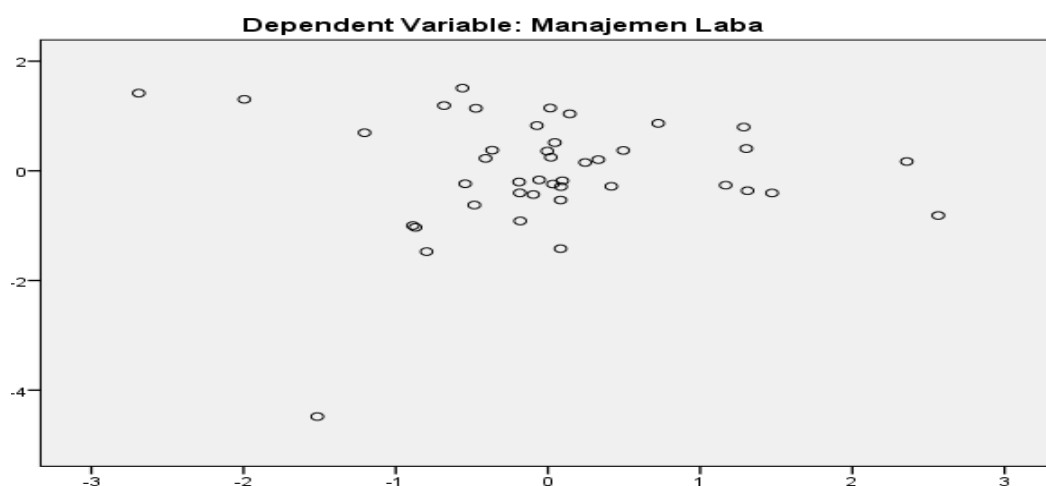
Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS terlihat untuk lima variabel independen, angka VIF untuk variabel pajak tangguhan sebesar 1,222; Angka VIF untuk variabel perencanaan pajak sebesar 1,159; angka VIF untuk variabel ukuran perusahaan sebesar 1,075. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai VIF seluruh variabel bebas kurang dari 10. Sehingga disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas tidak mempunyai masalah dengan multikolinieritas

c. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghazali (2011: 139) heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan

satu pada pengamatan lain dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode *scatterplot*. Dengan dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.2
Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa tidak ditemukan pola tertentu yang teratur dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi liner ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2011: 110). Untuk pengujian autokorelasi digunakan uji Durbin Watson hanya digunakan autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) independen.

Tabel 4.4
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.435 ^a	.189	.125	.029877	2.203

Uji autokorelasi menggunakan pengujian Durbin-Watson. Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS, menunjukkan hasil sebesar 1,797. Dengan 3 variabel bebas, dan $n = 42$ diketahui $du = 1,6617$, sedangkan $4 - du = (4 - 1,6617) = 2,3383$.

Sehingga hasil perhitungan uji durbin watson terletak diantara 1,6617 – 2,3383 yang berarti model regresi tidak ada masalah autokorelasi.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.5
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,007	,059		,127	,899
Total Aset	-,001	,003	-,031	-,204	,840
Pajak Tangguhan	-,004	,002	-,458	-2,838	,007
Perencanaan Pajak	,058	,044	,206	1,311	,198

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS diperoleh persamaan regresi yaitu $\hat{Y} = 0,007 - 0,004 X_1 + 0,058 X_2 - 0,001 X_3$ dan dapat diambil suatu analisis bahwa :

- Nilai a (konstanta) sebesar 0,007 dapat diartikan bahwa jika pajak tangguhan, perencanaan pajak dan ukuran perusahaan bernilai konstan atau nol maka manajemen laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018 akan bernilai 0,007%.
- Koefisien regresi untuk pajak tangguhan sebesar 0,004 dan bertanda negatif menyatakan bahwa setiap peningkatan pajak tangguhan sebesar

1 % maka akan menurunkan manajemen laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018 sebesar 0,004%.

- c. Koefisien regresi untuk perencanaan pajak sebesar 0,058 dan bertanda positif menyatakan bahwa setiap peningkatan perencanaan pajak sebesar 1 % maka akan meningkatkan manajemen laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018 sebesar 0,058 %.
- d. Koefisien regresi untuk ukuran perusahaan sebesar 0,001 dan bertanda negatif menyatakan bahwa setiap peningkatan ukuran perusahaan sebesar 1 juta rupiah maka akan menurunkan manajemen laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018 sebesar 0,001 %.

3. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Tingkat signifikansi atau probabilitasnya adalah sebesar 5% atau 0,05.

Tabel 4.6

Hasil Uji Signifikan Parameter Simultan (Uji Statistik F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,008	3	,003	2,961	,044 ^b
	Residual	,034	38	,001		
	Total	,042	41			

Dari perhitungan uji signifikan parameter simultan (uji statistik F) pajak tangguhan terhadap manajemen laba dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai $\text{sig} = 0,044 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018.

4. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 4.7

Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,007	,059		,127	,899
Total Aset	-,001	,003	-,031	-,204	,840
Pajak Tangguhan	-,004	,002	-,458	-2,838	,007
Perencanaan Pajak	,058	,044	,206	1,311	,198

- Dari perhitungan uji signifikan parameter individual (uji statistik t) pajak tangguhan terhadap manajemen laba dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai $\text{sig} = 0,007 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018.
- Dari perhitungan uji signifikan parameter individual (uji statistik t) perencanaan pajak terhadap manajemen laba dengan menggunakan

SPSS diperoleh nilai $\text{sig} = 0,198 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018.

- c. Dari perhitungan uji signifikan parameter individual (uji statistik t) ukuran perusahaan terhadap manajemen laba dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai $\text{sig} = 0,840 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018.

5. Koefisien Determinasi

Dalam uji regresi linier berganda dianalisis pula besarnya koefisien determinasi (r^2) keseluruhan. r^2 digunakan untuk mengukur ketepatan yang paling baik dari analisis regresi berganda. Jika r^2 mendekati 1 (satu) maka dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika r^2 mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variabel bebas menerangkan variabel terikat.

Tabel 4.8
Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.435 ^a	.189	.125	.029877	2.203

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat besarnya nilai ***R Square*** (R^2) sebesar 0,125 yang berarti pengaruh pajak tangguhan, perencanaan pajak dan ukuran

perusahaan secara bersama-sama terhadap manajemen laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018 adalah sebesar 12,5 %. Sedangkan sisanya 87,5 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat dijelaskan.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Dari perhitungan uji signifikan parameter individual (uji statistik t) pajak tangguhan terhadap manajemen laba dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai $\text{sig} = 0,007 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018.

Teori agensi menyatakan dalam meminimalkan tingkat kesalahan informasi, diperlukan pengawasan langsung dan kesalahan tersebut merupakan salah satu bukti lemahnya pengawasan serta pengendalian dari wakil prinsipal. Semakin besarnya motivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba akan menyebabkan semakin besarnya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba perpajakan Mills dan Newberry, 2001 dalam (Tundjung, 2015).

Yulianti (2004) membuktikan bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan sebagai alternatif untuk membuktikan probabilitas manajemen laba untuk menghindari kerugian. Dalam melanjutkan hasil yang didapat tersebut, Philips, et al (2004) dalam (Tundjung, 2015) menginvestigasi perusahaan-perusahaan yang terkait melakukan manajemen laba dengan

perubahan dari komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan (kewajiban pajak tangguhan bersih) yang merupakan refleksi dari nilai beban pajak tangguhan pada laporan laba rugi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sumomba, 2013) membuktikan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba tetapi tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setyawan, 2016) membuktikan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

2. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Dari perhitungan uji signifikan parameter individual (uji statistik t) perencanaan pajak terhadap manajemen laba dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai $\text{sig} = 0,198 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018.

Peran perencanaan pajak dalam praktik manajemen laba secara konseptual dapat dijelaskan dengan teori keagenan dan teori akuntansi positif. Pada teori keagenan, dalam hal ini pemerintah (fiskus) sebagai pihak *principal* dan manajemen sebagai pihak *agent* masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Perusahaan (*agent*) berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Di lain pihak, pemerintah (*principal*) memerlukan dana dari

penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, terjadi konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah, sehingga memotivasi agent meminimalkan beban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah (Hidayati & Zulaika, 2003).

Agar nilai saham perusahaan meningkat, maka manajemen termotivasi untuk memberikan informasi kinerja perusahaan yang sebaik mungkin. Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan untuk mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan (Aditama & Purwaningsih, 2013).

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Sumomba, 2013) dan (Santana & Wirakusuma, 2016) yang membuktikan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba namun sesuai dengan penelitian (Aditama & Purwaningsih, 2013) dan Setywan (2013) yang membuktikan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan farmasi cenderung tidak melakukan perencanaan pajak, terbukti dengan rata-rata nilai persentase beban pajak terhadap laba sebelum pajaknya adalah 72,97% atau lebih tinggi dari tariff pajak penghasilan normal yaitu 25%. perusahaan farmasi menghadapi banyak aturan pajak yang harus dibayar sehubungan dengan proses produksi yang dilaporkan. sehingga

dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak tidak mempengaruhi manajemen laba.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba

Dari perhitungan uji signifikan parameter individual (uji statistik t) ukuran perusahaan terhadap manajemen laba dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai $\text{sig} = 0,840 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018.

Terdapat dua pandangan tentang bentuk hubungan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Pandangan pertama menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dengan manajemen laba, karena perusahaan besar memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan kecil, sehingga lebih memungkinkan untuk melakukan manajemen laba. Pandangan kedua menyatakan ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba (Muliati, 2011).

Semakin besar aset perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam saham perusahaan tersebut semakin banyak. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak

perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat (Nasution & Setiawan, 2007).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Santana (2016) yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba namun tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muliati, 2011) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba.
2. Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variable yaitu pajak tangguhan, perencanaan pajak, dan ukuran perusahaan, diharapkan peneliti selanjutnya bisa menambahkan jumlah variable lain misalnya: reputasi auditor, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian dengan menambahkan jumlah sampel tidak hanya terfokus pada perusahaan farmasi saja, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi misalkan kelompok perusahaan otomotif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, F., & Purwaningsih, A. (2013). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Non Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Online. www.e-journal.uaajy.ac.id.
- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2007). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Belkaoui, A. R. (2007). *Teori Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Brigham, E., & Houston, J. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Edisi 11 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chariri, A., & Ghozali, I. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: BP. UNDIP.
- Dewi, L. S., & Ulupui, I. K. (2014). Pengaruh Pajak Penghasilan dan Asset Perusahaan terhadap Earning Management pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI Tahun 2010-2012. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 8.1 (2014): 250-259. Online. www.download.portalgaruda.org/article.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Harahap, S. S. (2012). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hidayati, S. M., & Zulaika. (2003). Analisis Perilaku Earning Management: Motivasi Minimalisasi Income Tax. *Simposium Nasional Akuntansi VI.*, Hal 526-537.
- Husnan, S., & Pudjiastuti, E. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Edisi 5*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Jurnal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4, October pp. 305-360.
- Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba Dan Nilai Perusahaan. (2006). *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*, 23-26 Agustus 2006.
- Muliati, K. (2011). Pengaruh Asimetri dan Ukuran Perusahaan Pada Praktek Manajemen Laba di Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI. *Tesis. Universitas Udayana*, Online. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi>.

- Muljono, D. (2014). *Tax Planning Menyiasati Pajak Dengan Bijak*. Yogyakarta: Andi.
- Munawir, S. (2010). *Analisa Laporan Keuangan. Edisi Keempat*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasution, M., & Setiawan. (2007). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi*, Volume 10 Juli:26-28.
- Prasetya, P. J. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Intervening. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 14.1 Januari 2016: 511-538. Online. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/17482>.
- Santana, D. K., & Wirakusuma, M. G. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktek Manajemen Laba. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14.3 (2016) Hal: 1555-1583 Online. www.download.portal-garuda.org/article.php.
- Sartono, A. (2013). *Manajemen Keuangan, Teori dan Aplikasi. Edisi Keempat*. Yogyakarta: BPFE.
- Sawir, A. (2013). *Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Setiawati, L., & Na'im, A. (2000). Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 15 No 4, 424 - 441.
- Setyawan, B. (2016). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Profitabilitas, Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba. *jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang*, Online. www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/keberlanjutan/article/download/85/59.
- Siallagan, H., & Machfoeds, M. (2006). Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba Dan Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi 9*, Padang 23-26 Agustus 2006. Online. <https://smartaccounting.files.wordpress.com/2011/03/k-akpm13.pdf>.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sulistyanto, S. (2009). *Manajemen Laba*. Jakarta: Gramedia.

- Sumomba, C. R. (2013). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *KINERJA*, Volume 16, No 2, Th. 2012 Hal. 103-115 Online. www.e-journal.undip.ac.id/index.php/accounting.
- Tandelilin, E. (2007). *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta: BPFE.
- Tundjung, G. M. (2015). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI). *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2015, Halaman 1-9. Online. <http://e-journal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Wijaya, M., & Martani, D. (2011). Praktik Manajemen Laba Perusahaan Dalam Menanggapi Penurunan tarif Pajak Sesuai UU NO. 36 Tahun 2008. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*, Online. www.mfile.narotama.ac.id.
- Wiryandari, S. A., & Yulianti. (2015). Hubungan Perbedaan Laba Akuntansi dan laba Pajak Dengan Perilaku Manajemen Laba dan Persistensi Laba. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, Online. www.pdeb.fe.ui.ac.id.
- Zain, M. (2015). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.